

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2023*.
- Bappeda Sidoarjo. (2011). *Buku Putih Sanitasi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2011*.
- Goesty, P. A., Samekto, A., & Sasongko, D. P. (2012). *Analisis Penaatan Pemrakarsa Kegiatan Bidang Kesehatan Di Kota Magelang Terhadap Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup*. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 10(2), 89-94
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*. *Crepido*, 1(1), 13-22.
- Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. (2018). *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektr.*
- LHK\_RI, K. (2021). *Permen LHK No.04 Tahun 2021`*. *Ministry of Environment and Forestry Republic of Indonesia*, 3, 1–319.
- Menteri Negara Lingkungan Hidup. (1996). *Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Tingkat Kebisingan*. *Acta Acustunited Ac.*, 26(4), 551–556.
- Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik. (2011). *Tentang Nilai Ambang Batas Faktor Fisika dan Kimiaa di Tempat Kerja*. *Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.13/MEN/X/2011*, 1–40.
- Negara, S. (2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik*. *Peraturan Pemerintah*, 4(039247), 39247–39267.
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2009). *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 - 2029*. 1–8.
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (2019). *Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Detil Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Buduran Tahun 2019-2039*. *Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo*, 2, 1–13.
- Pemerintah Provinsi Jawa Timur. (2012). *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang RT RW Prov. Tahun 2011-2031*. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur*, 66(4), 37–39.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia No*

*32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*  
Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.* Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1(078487A), 483.  
<http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/>

Ross, W.A., Saunders, A.M. and Marshall, R., 2006, *Common Sense in Environmental Impact Assessment : „It Is Not As Common As It Should Be, Impact Assessment And Project Appraisal“*, Volume 24